

PRESS RELEASE

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

BPKP melaksanakan Workshop Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang diselenggarakan di Aula Gandhi, Kantor Pusat BPKP, Jakarta (30/10/2013). Acara diawali dengan sambutan Sekretaris Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik pada , Ismail Cawidu yang mewakili Ketua Badan Koordinasi Humas (Bakohumas). Selanjutnya, workshop tersebut dibuka oleh Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari. Dalam arahannya, beliau menjelaskan bahwa BPKP telah memiliki Peraturan Kepala BPKP No. 28 Tahun 2013 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik dan Peraturan Kepala BPKP No. 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPKP. Melalui kebijakan tersebut, BPKP berupaya menciptakan kemudahan akses bagi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang dikecualikan.

Workshop bertitel “Keterbukaan Informasi Pilar Anti Korupsi” ini mengundang Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Palsoskam, Binsar H. Simanjuntak sebagai *keynote speaker*. Bertindak sebagai moderator, pengamat ekonomi sekaligus Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani. Pesertanya terdiri dari utusan Humas Kementerian/Lembaga dan BUMN serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPKP.

Menurut Ahok, penerima Hatta Anti-corruption Award itu, untuk mengawasi anggaran, Pemprov DKI telah bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Salah satu isi kerjasamanya, Pemprov DKI Jakarta telah “meminjam” 50 orang auditor untuk membenahi sisi anggaran disamping mengawasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov DKI. Dalam era duet Jokowi-Ahok juga, Pemprov DKI pertama kali melaksanakan penerimaan CPNS dengan sistem *CAT (Computerized Assisted Test)*.

Deputi Kepala BPKP Bidang Palsoskam, Binsar H. Simanjuntak selaku Sekretaris Tim Pengawas Panitia Seleksi Pengadaan CPNS 2013 mengakui, seleksi CPNS rawan kepentingan, rawan korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya. Untuk itu, seleksi CPNS membutuhkan transparansi dan pengendalian melalui mitigasi risiko. Dukungan transparansi didukung penuh oleh Kementerian PAN-RB, Ombudsman RI, ICW, Badan Kepegawaian Nasional, dan tentunya oleh BPKP selaku Ketua Tim Pengawas Panitia Seleksi Nasional CPNS 2013. Pengadaan CPNS, menurut Binsar merupakan titik kritis utama dalam membangun birokrasi. Karena dampak yang akan dirasakan dari prosedur ini akan dirasakan 20 hingga 30 tahun mendatang dimana mereka yang akan menggerakkan pemerintahan. “Jika seleksinya menyimpang, bagaimana pemerintahan 20-30 mendatang?”, jelas Binsar. Di sinilah peran BPKP dalam mengawal proses pengadaannya.

Nuri Sujarwati
Kepala Bagian Humas dan Hubungan Antar Lembaga BPKP
Jalan Pramuka 33, Jakarta Timur
Telp. 021-85910031 psw 0706